

Strategi Kepemimpinan Lurah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Mendukung Pembangunan Di Kelurahan Senggarang

PUTRA

ppuutrraa@gmail.com

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada 20 Juli 2016 yang diselenggarakan di Kelurahan Senggarang Kota Tanjungpinang. Masyarakat di Kelurahan Senggarang telah menerapkan semangat gotong royong untuk membangun daerah. Ini adalah salah satu bentuk keberhasilan kepemimpinan pemimpin dalam mengelola masyarakat berdasarkan semangat gotong royong dalam membangun kawasan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepemimpinan Lurah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di daerah pengembangan Kelurahan Senggarang Kota Tanjungpinang, yang mana lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Senggarang, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil studi Kepemimpinan Lurah Iman Satria, S. Sos di Kelurahan Senggarang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yang bertujuan untuk pengembangan kawasan di Kelurahan Senggarang dengan menggunakan strategi *Bartering*, Strategi *Building*, Strategi *Binding*, serta Strategi *Bonding* dalam kepemimpinan pemerintah yang dijalankan oleh Imam Satria, S.Sos.

Kata kunci: Kelurahan Senggarang, Strategi, Partisipasi Masyarakat

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, dengan demikian usaha pembangunan berarti humanisasi atau peningkatan taraf hidup manusia sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan dan senantiasa menciptakan keselarasan dan keseimbangan dalam hidupnya, baik secara rohani dan jasmani.

Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah provinsi, dan terdapat pula didalamnya atas daerah yang lebih kecil yaitu Kabupaten/Kota, kemudian Kecamatan dan hingga tingkat yang lebih kecil yaitu Desa/Kelurahan, daerah-daerah tersebut menjadi satu kesatuan dalam wilayah negara Republik Indonesia, Oleh karena itu pembangunan harus tersebar secara merata dari seluruh wilayah Republik Indonesia agar terwujud masyarakat yang adil dan makmur. Dalam hal ini, pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho dan Rochmin Danuri, 2004) Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan adalah kesadaran yang tidak bisa muncul dengan sendirinya.

Otonomi Daerah dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 memiliki arti otonomi desa bahwa desa mampu berinisiatif dan berkeaktifan untuk menjalankan pemerintahannya sendiri serta menumbuhkan demokratisasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga desa atau setingkat Kelurahan

memiliki ruang gerak yang luas dalam melaksanakan pembangunan, karena tidak terbebani lagi dengan program-program pembangunan dari kabupaten/kota, provinsi maupun pemerintah pusat.

Sasaran pembangunan nasional adalah pembangunan manusia secara utuh lahir dan batin serta merata. Sasaran tersebut mengandung makna bahwa tujuan akhir pembangunan adalah terwujudnya masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya baik material maupun non material secara merata.

Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah diadakan bukan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakatnya mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapainya tujuan bersama, Rasyit (1998:139). Paradigma penyelenggaraan pemerintah telah terjadi penggeseran dari paradigma *rule governance* dalam penyelenggaraan pemerintah. Pembangunan dan pelayanan publik tidak semata-mata didasarkan pada pemerintahan atau Negara saja tetapi harus melibatkan seluruh elemen baik didalam interen birokrasi maupun diluar birokrasi publik (masyarakat).

Kelurahan merupakan perangkat Kotamadya/Kabupaten administrasi dalam pelayanan masyarakat di Kelurahan. Dalam Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada camat, dan juga Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan masyarakat di wilayah Kelurahan. Melihat dari Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten dan kota yang berkedudukan di

Kecamatan. Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang tahun 2009 tentang fungsi Kelurahan sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah kelurahan pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat.
- b. Melakukan tugas dibidang pembangunan, pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Kegotong royongan.
- d. Melakukan kegiatan dalam rangka ketentraman dan ketertiban wilayah kelurahan.
- e. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada kelurahan.

Di dalam Pemerintahan Kelurahan, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 dalam pasal 4, Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan ketertiban umum serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota. Adapun fungsi Lurah dalam Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005, pasal 5 ayat 1 adalah:

- a. pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Pembangunan yang dilaksanakan di tingkat Kelurahan merupakan realisasi pembangunan nasional. Untuk menunjang pembangunan di tingkat Kelurahan peran serta pemerintah serta partisipasi seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, demikian pula halnya sumber daya manusia harus lebih ditingkatkan sehingga dapat mengembangkan potensi alam secara maksimal agar tujuan pembangunan dapat tercapai.

Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan adalah kesadaran yang tidak bisa muncul dengan sendirinya, kesadaran tersebut harus dibimbing dan diarahkan sampai mereka bisa mencapai kemandiriannya sendiri, dengan adanya keterlibatan secara mental dan emosional mulai dari keterlibatan perumusan kebijakan, pelaksanaan, tanggung jawab sampai pemanfaatan pembangunan akan bisa dirasakan secara merata oleh pihak-pihak tertentu.

Untuk menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya terhadap pembangunan diperlukan adanya tenaga/unsur penggerak yang mampu menggerakkan dan mengarahkan kemampuan masyarakat untuk dapat mewujudkan cita-cita pembangunan dalam hubungan ini, maka Lurah sebagai Kepala Kelurahan memegang peranan yang menentukan. Sebagai pimpinan tertinggi dan penanggung jawab pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, Lurah harus mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya yang saling terkait termasuk tugas pembangunan yang multi dimensional. Mengingat kedudukan tersebut maka Lurah mempunyai peranan yang sangat besar dalam usaha menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan pada

umumnya dan pembangunan di wilayah Kelurahan khususnya. Adapun upaya yang dilakukan oleh Lurah tersebut akan menimbulkan pengaruh terhadap masyarakat. Pengaruh tersebut antara lain berupa tanggapan kesediaan dan keterlibatannya dalam pembangunan. Apabila hal ini dapat ditumbuhkan dan ditingkatkan maka pada gilirannya tujuan pembangunan yang dicitacitakan akan lebih mudah untuk diwujudkan.

Keberhasilan dalam melakukan pembangunan di tingkat Kelurahan juga tergantung dari sejauh mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur pemerintahan kelurahan dalam perencanaan pembangunan tersebut. Masyarakat harus ikut berpartisipasi dan diberi kepercayaan dan kewenangan yang cukup dalam mengurus rumah tangga kelurahannya, sehingga bisa mandiri Selain sebagai pelaksana dan perencana program pembangunan, maka para aparatur pemerintah kelurahan juga berperan sebagai pelayan masyarakat dalam dan sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah tersebut.

Figur serta integritas seorang pemimpin juga harus bisa memberikan kesan yang positif kepada warganya, karena faktor subyektifitas masih sangat mungkin terjadi. Dengan adanya kesan yang positif dari masyarakat maka akan lebih mudah proses interaksi dan juga komunikasi antar semua lapisan masyarakat semakin bisa berjalan dengan baik sehingga terciptanya suatu kondisi yang harmonis dan dengan sendirinya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi terhadap program Kelurahan bisa terwujud (Miftahus Surur, 2013).

Dalam perannya terhadap peningkatan partisipasi masyarakat, lurah Imam Satria berinisiatif melalui langkah persuasi dalam menyampaikan informasi

seputar Kelurahan dengan melakukan komunikasi publik melalui sarana pertemuan warga. Sarana yang sering digunakan oleh Lurah seperti Masjid dimana lurah sering diminta menjadi penceramah pada kegiatan shalat Jum'at. Selain Masjid sarana yang menjadi perkumpulan warga seperti tahlilan juga menjadi sarana penyampaian informasi kepada masyarakat. Lurah mencoba membangun kepercayaan kepada masyarakat dengan cara selalu mendatangi setiap undangan dari masyarakat. Adapun faktor penghambat yang dimiliki lurah Imam Satria dalam membangun pembangunan daerah di Kelurahan meliputi kurangnya intensitas pertemuan pada tingkat RT/RW, serta tidak sepenuhnya pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) aktif dalam mendukung program – program Kelurahan.

Sebagai wujud adanya partisipasi masyarakat di Kelurahan Senggarang telah dibangun berbagai infrastruktur seperti gedung posyandu, gedung masjid, gedung SD, gedung PAUD, selokan air dan jalan raya. Selain pembangunan infrastruktur tersebut di Kelurahan Senggarang dilaksanakan berbagai kegiatan pembangunan yang melibatkan masyarakat seperti bakti sosial (BAKSOS) yang melibatkan semua masyarakat ikut berpartisipasi seperti membersihkan fasilitas umum seperti masjid, serta jalan raya.

Partisipasi masyarakat Kelurahan Senggarang relatif bervariasi baik dari segi intensitasnya maupun dari segi bentuknya. Dari segi intensitasnya ada yang partisipasinya sangat rendah, dan ada pula yang sangat tinggi, serta dari segi bentuknya ada yang partisipasinya dalam bentuk pemikiran/ide, dan ada pula yang partisipasinya dalam bentuk materi dan uang tunai. Intensitas dan bentuk

partisipasi masyarakat di atas dapat pula berbeda diantara bidang-bidang partisipasi dalam pembangunan, seperti dibidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi/monitoring, dan pemanfaatan hasil/pengawasan. Secara teori perbedaan tersebut dapat pula disebabkan oleh adanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dimaksud adalah kesadaran/kemauan, pendidikan, dan penghasilan. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari kepemimpinan dan fasilitas yang tersedia.

BAHAN DAN METODE

Perumusan Masalah

Fokus pada penelitian ini lebih ditekankan pada bentuk – bentuk strategi lurah Senggarang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan wilayah Kelurahan Senggarang.

Menurut Lexy j. Moleong (2007:92) menyatakan bahwa penelitian jenis apapun titik tolaknya tidak lain bersumber pada masalah. Tanpa masalah penelitian itu tidak dapat dilaksanakan.

Dalam penelitian ini penulis memberikan batasan-batasan masalah sebagai berikut:

Bagaimana Strategi lurah Senggarang Imam Satria dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan di wilayah Kelurahan Senggarang ?

Kerangka Teori

1. Konsep Strategi

Dalam kegiatan sehari-hari masalah strategi merupakan masalah yang sangat urgen, yang akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, setelah dijabarkan tujuan yang hendak dicapai. Hal demikian terjadi dalam setiap organisasi atau lembaga, dimana tidak terlepas dari penetapan strategi, yang berbeda hanyalah apakah strategi itu tepat, berjalan dengan baik, efisien, dan efektif atau memenuhi semua unsur yang perlu diperhatikan dalam hal penerapannya.

Menurut Robbins (1990) sebagaimana dikutip oleh (Morissan, 2008:49), mendefinisikan strategi sebagai “*the determination of the basic long-term goals and objectives of an enterprise, and the adoption of course of action and the allocation of resources necessary for carrying out this goals*” (penentuan jangka panjang dan memutuskan arah tindakan serta mendapatkan sumber-sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan)

Cravens (2001:6) strategi adalah rencana yang disatukan dan terintegrasi, menghubungkan keunggulan strategi organisasi dan dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Strategi dimulai dengan konsep menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dalam lingkungan yang berubah-ubah.

Kotler (2004:31) mengemukakan bahwa strategi adalah penempatan misi suatu organisasi, penetapan sasaran organisasi dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan teknik tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat sehingga tujuan dan sasaran utama dari organisasi akan tercapai.

Aliminsyah dan Pandji (2004:81) mengartikan bahwa strategi adalah wujud rencana yang terarah untuk memperoleh hasil yang maksimal. Dalam hal ini strategi dalam setiap organisasi merupakan suatu rencana keseluruhan untuk mencapai tujuan. Jadi organisasi tidak hanya memilih kombinasi yang terbaik, tetapi juga harus mengkoordinir berbagai macam elemen untuk melaksanakan kegiatannya secara efisien dan efektif.

Dengan adanya strategi, maka suatu organisasi akan dapat memperoleh kedudukan atau posisi yang kuat dalam wilayah kerjanya. Hal ini disebabkan karena organisasi tersebut mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang lebih baik dalam melakukan pendekatan bagi pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan dalam wilayah kerja yang dilayaninya.

2. Konsep Kepemimpinan

Winardi mengartikan bahwa kepemimpinan merupakan suatu kemampuan yang melekat pada diri seseorang yang memimpin, yang tergantung dari macam-macam, faktor-faktor intern maupun ekstern, diantaranya meliputi orang-orang; bekerja dari sebuah posisi organisatoris; dan timbul dalam sebuah situasi yang spesifik. Sehingga kepemimpinan timbul, apabila ketiga faktor tersebut saling mempengaruhi satu sama lain yaitu situasi dan posisi ada, orang-orangnya juga ada. Beberapa implikasi dari berbagai definisi diatas adalah :

1. kepemimpinan melibatkan orang lain yaitu pengikut. Sebagai akibat dari kesediaan menerima petunjuk dari seorang pemimpin. Anggota kelompok harus dapat memahami status pemimpinnya yang memungkinkan proses kepemimpinan berjalan dengan baik.

2. Kepemimpinan melibatkan kekuasaan yaitu kemampuan untuk menggunakan pengaruh artinya kemampuan untuk mengubah sikap dan tingkah laku individu atau kelompok.
3. Kepemimpinan melibatkan pengaruh (*influence*) yaitu tindakan tingkah laku yang menyebabkan perubahan sikap dan tingkah laku individu dan kelompok.

Berdasarkan pendapat di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Kepemimpinan adalah suatu kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan atau kelompok, untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok.

Kemampuan seseorang dalam menyelenggarakan berbagai fungsi manajerial, sesungguhnya merupakan bukti yang paling nyata dari efektivitasnya sebagai seorang pemimpin sehingga dewasa ini banyak gaya yang digunakan untuk mengidentifikasi tipe-tipe kepemimpinan. Teori kepemimpinan pada dasarnya ada tiga yaitu : (1) Trait theories, (2) Style theories, (3) Contingency theories. (Veryard Projects Ltd & Antelope Projects Ltd, dalam Robbin, 2002:1).

a. Teori Karakter (*Trait theories*)

Teori Karakter (*Trait theories*) yaitu untuk menjadi seorang pemimpin, harus mempunyai kemampuan : intelegensi (kemampuan memahami dan memecahkan masalah), karakter (inisiatif dan percaya diri), fisik, (sehat), kategori sosial (jender, kelas sosial atau etnik). Robbins (2002:40) mengemukakan teori ciri kepemimpinan ini mencari ciri kepribadian, sosial, fisik, atau intelektual yang membedakan pemimpin dari bukan pemimpin.

Teori ini mencoba untuk mencari karakter yang konsisten dan unik yang berlaku secara universal yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang efektif. Karakter yang dimaksud meliputi ambisi dan energi, hasrat untuk memimpin,

kejujuran dan integritas (keutuhan), percaya diri, kecerdasan, dan pengetahuan yang relevan dalam pekerjaan.

b. *Style theories* atau gaya kepemimpinan

Style theories yaitu gaya kepemimpinan yang baik yaitu meliputi : kepemimpinan yang autokratik (eksploitatif, partisipatif dan demokratis), memberitahukan, menjajakkan, mengikutsertakan, mendelegasikan.

c. *Contingency theories*

Contingency theories yaitu teori ini model kepemimpinan ada dua yaitu : (1) *style depends on circumstance* yang terdiri dari : pemimpin bawahan yang menjalin hubungan, struktur tugas, tinggi rendahnya posisi dan otoritas kekuasaan. (2) *gauge situation favourableness* yang terdiri dari : Pemimpin senantiasa berorientasi tugas, orientasi anggota.

3. **Konsep Strategi Kepemimpinan**

Strategi kepemimpinan adalah Suatu rencana yang tersusun dengan rapih, yang dimiliki pemimpin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin rakyatnya. Sehingga rencana tersebut dapat diterapkan di dalam organisasi yang dipimpin. Serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan.

Menurut Sergionvani (2006:159), Terdapat empat strategi kepemimpinan yang dipertimbangkan efektif untuk kontek tertentu :

- a. *Bartering*, pemimpin memberikan kepada yang dipimpin apa yang diinginkan sebagai ganti atau tukar atas apa yang diinginkan pemimpin. Strategi kepemimpinan ini menekankan pada “*trading*” keinginan dan kebutuhan kerjasama dan kepatuhan. Strategi ini akan menciptakan

hubungan berdasarkan “barter” pemenuhan keinginan dan kebutuhan pemimpin dan bawahan. Dalam strategi *bartering* ini, peneliti memfokuskan pada sistem pemberian tugas atau penyerahan tugas Lurah dalam menjalankan tugasnya.

- b. *Building*, pemimpin menciptakan iklim dan dukungan interpersonal yang baik untuk meningkatkan kesempatan staf memenuhi kebutuhan prestasi, tanggung jawab, kompetensi, dan penghargaan diri. Strategi ini hanya sedikit menekankan pada *trading* dan lebih pada penciptaan kondisi yang memungkinkan bawahan terpenuhi kebutuhan psikologis. Dalam strategi *building* ini, peneliti fokus pada program kerja yang dilakukan di dalam Kelurahan terutama pembangunan fisik diwilayah Kelurahan.
- c. *Binding*, pemimpin dan staf bersama-sama mengembangkan nilai tentang hubungan dan ikatan yang sama-sama mereka inginkan sehingga menjadi komunitas. *Binding* disini yaitu seperti apa cara Lurah dalam melakukan kerjasama aparat untuk membangun kinerja yang baik.
- d. *Bonding*, pemimpin menekankan pada hubungan saling peduli dan tergantung yang dihasilkan dari pelaksanaan kewajiban dan komitmen bersama. Dalam hal ini kepemimpinan dan pengembangan akan dapat terus berjalan. Orang-orang menjadi sebuah komunitas satu pikiran, hati dan praktik. Strategi kepemimpinan ini lebih menekankan moral sebagai sumber kekuasaan. *Bonding* ini yaitu suatu bentuk tanggung jawab kepala desa dalam menjalankan ketiga indikator diatas sehingga menghasilkan strategi yang baik.

4. Konsep Partisipasi Masyarakat

Partisipasi mengandung pengertian lebih dari sekedar peran serta. Partisipasi memiliki peran yang lebih aktif dan mengandung unsur kesetaraan dan kedaulatan dari para pelaku partisipasi. Sedangkan peran serta bisa diartikan sebagai pelengkap dan tidak harus kesetaraan.

Menurut Conyers (1994:154), ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting, diantaranya :

- a. partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
- b. masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut.
- c. timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

5. Konsep Pembangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 258 ayat 1 dan 2 menyebutkan Pembangunan Daerah yaitu daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya

saing daerah. Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Menurut buku panduan persatuan bangsa-bangsa dalam Hartoyo dkk. (1996:6) pembangunan adalah suatu proses dimana anggota masyarakat pertama mendiskusikan dan merencanakan dan menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama untuk memenuhi keinginan mereka tersebut. Lebih lanjut dikatakan pembangunan dimaksudkan untuk meletakkan landasan yang kuat dan kokoh bagi masyarakat di daerah berkembang atas kekuatan dan kemampuan sendiri, sedangkan pemerintah hanyalah bersifat memberi bantuan, pengarahan dan bimbingan serta mengarahkan yang dapat meningkatkan usaha tumbuh dan berkembang.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Jhon SW. Creswell (dalam Hamid Patilima, 2011:3) mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambar holistik (menyeluruh) yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah. Sedangkan jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, hal ini menurut Subana dan Sudrajat (2005:89) menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan, variabel, dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dan menyajikannya apa adanya, hal ini memungkinkan penulis mengkaji lebih mendalam mengenai Strategi

kepemimpinan Lurah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Kelurahan Senggarang.

Jenis data yang digunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder. Sumber data diperoleh secara langsung dari informan dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, dan data lain untuk melengkapi dan mendukung penulisan terkait dengan kepemimpinan Lurah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah di Kelurahan Senggarang.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Data dikumpulkan, dianalisis, dan dihubungkan dengan teori-teori yang ada, kemudian akan diolah dengan metode deskriptif, yaitu suatu analisa yang menggambarkan secara rinci dan sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat.

HASIL

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Strategi Kepemimpinan Lurah Imam Satria Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Mendukung Pembangunan Di Kelurahan Senggarang.

Untuk melihat strategi yang digunakan oleh Lurah Senggarang dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat Senggarang untuk mendukung pembangunan, maka penulis telah melakukan wawancara dengan informan yaitu Lurah, Sekretaris Lurah, pegawai Kelurahan, dan pengurus – pengurus Kelembagaan Masyarakat di Kelurahan Senggarang, wawancara ini dilakukan pada tanggal 21 September 2017 sekitar pukul 11.00 WIB, penulis telah melakukan wawancara dengan Lurah Kelurahan Senggarang Kecamatan

Tanjungpinang Kota selaku *Key Informan*. Untuk melihat strategi yang digunakan oleh Lurah Senggarang dalam meningkatkan Partisipasi masyarakat Senggarang untuk mendukung pembangunan. Penulis mengacu pada beberapa teknik dalam kepemimpinan Kelurahan yang meliputi:

1. **Strategi Bartering**

Kepemimpinan Lurah Imam Satria menunjukkan adanya strategi *bartering* yaitu dalam penyerahan tugas dan sistem perundingan peran yang dijalankan yaitu mengkoordinasikan pembangunan Kelurahan Senggarang secara partisipatif, Selain itu strategi bartering yang berjalan di Kelurahan Senggarang yaitu menerapkan sistem pelimpahan kewenangan dan perundingan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan. Hal ini diperoleh dari hasil wawancara berikut :

2. **Strategi Building**

Peran Lurah Imam Satria dalam menjalankan Strategi *Building* yaitu dalam menjalankan program kerja Kelurahan Senggarang dibawah pimpinan Lurah Imam Satria mengkoordinasikan pembangunan secara partisipatif, membangun dan memelihara pekerjaan umum seperti akses jalan, salurn air, pasar, got, masjid, lapangan olahraga, taman.

3. **Strategi Binding**

Strategi binding yaitu dengan melakukan mitra kerjasama dengan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Organisasi Nelayan Mandiri Jaya. dan aparat desa, yang berdasarkan fungsinya masing-masing. Kerjasama tersebut melalui musyawarah-musyawarah.

4. Strategi *Bonding*

Strategi *Bonding* yaitu berbentuk fisik dan moral. Bentuk fisiknya yaitu perwujudan apa yang dilakukan dari apa yang sudah direncanakan, karena hal tersebut telah memiliki Rancangan Perencanaan Pembangunan Kelurahan, yang akan berkaitan dengan anggarannya yang ada di APBD. Sedangkan tanggungjawab moral yaitu amanah tersebut yang harus dilaksanakan.

KESIMPULAN

Kepemimpinan pemerintahan terkait dengan istilah memimpin dan memerintah. Dari kata memimpin ini terbentuklah kata kepemimpinan, yaitu kemampuan menggerakkan dan mengarahkan orang-orang, dalam hal ini telah berlangsung suatu hubungan manusiawi. Lurah merupakan pemimpin formal dalam Kelurahan, dalam arti pemimpin pemerintahan di tingkat Kelurahan berfungsi sebagai penanggung jawab utama dibidang pemerintahan dan pembangunan kemasyarakatan dimana Lurah itu ditempatkan.

Lurah mempunyai peranan yang sangat besar dalam usaha menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan pada umumnya dan pembangunan di wilayah Kelurahan khususnya. Sebagaimana hasil dari analisa yang mengacu dari informasi-informasi yang didapat dari *key informan* dan informan, maka penulis membuat beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari perumusan masalah. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sudah dapat dikatakan berjalan efektif dalam hal meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Kepemimpinan Lurah yang dijalankan Bapak Imam Satria menggunakan strategi pendekatan kepada masyarakat melalui beberapa strategi kepemimpinan yang mampu diadopsi oleh

masyarakat Senggarang pada umumnya yang cenderung menggunakan kekuasaan untuk menggerakkan orang-orang seperti strategi *Bartering*, strategi *Building*, strategi *Binding*, serta strategi *Bonding*.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel

Artikel **Panduan Penyusunan Citizen Charter & Good Practices Seri Manajemen Pelayanan Publik.**

Buku

Adisasmita, Raharjo. 2008. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Graha Ilmu: Yogyakarta.

Anoraga Pandji. 2001. *Psikologi Kepemimpinan*. Jakarta : Rineka Cipta

Aliminsyah & Pandji, 2004, *Kamus Istilah Manajemen*, Bandung : CV. Yrama Widya

Atik Winaisih & Ratminto, 2006. *Manajemen Pelayanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Bratakusumah. D.S. 1999. *Implikasi Undang-Undang Otonomi Daerah Terhadap Pembangunan Daerah Makalah*, Bandung.

Bratha Nyoman. 2003. *Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, Rafika Aditama

Budiardjo Miriam, 2000, **Menggapai Kedaulatan untuk Rakyat**, Mizan, Bandung

Chambers, Robert.1995. *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*.Yogyakarta : LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial)

Covey, Stephen R. 2001. Prinsip-Prinsip Kepemimpinan, Dinamis, Internmaster. Jakarta: Binarupa Aksara.

Cravens David, 2001, *Pemasaran Strategis*, Jakarta : Erlangga

Dwiyanto, Agus. 2002. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. PSKK UGM. Yogyakarta.

Fuad, Anis. 2014. *Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Gitosudarmo Indriyo & I Nyoman Sudita. 2000. *Perilaku Keorganisasian*. Yogyakarta : BPFE

Hutabarat J, Husaeni M. 2006. *Operasionalisasi Strategi*. Jakarta: Elex Media

Kaloh. J. 2010. *Kepemimpinan Kepala Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kansil, C. S. T. 1984. *Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah*. Bina Aksara: Jakarta.

Kartasmita, G. 1997. *Pemberdayaan Masyarakat : Konsep Pembangunan yang berakar pada Masyarakat*, Bappenas, Jakarta.

Kartono, Kartini. 2014. *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal itu?*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Keban, T. Yeremias, 1994. *Pengantar Administrasi Publik*, MAP, UGM : Yogyakarta.

Kotler, Philip dan Keller, Kevin Lane. (2004), *Manajemen Pemasaran 2*, Edisi Milenium, Jakarta: PT. Ikrar Mandiri

Kurniawan, Agung, 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*, Pembaruan : Yogyakarta.

- Moleong, Lexy J. (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Labolo, Muhadam, 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- LAN, 2003. *Penyusunan Standar Pelayanan Publik*, Jakarta. LAN.
- Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, 2006, JICA UGM, Yogyakarta.
- Moenir H.A.S, 1997. *Manajemen Pelayanan Umum*, Bumi Aksara : Jakarta.
- Morissan. 2010. *Manajemen Public Relations: Strategi Menjadi Humas Profesional*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group
- Nugroho, Rochim, 2004, *Pembangunan Wilayah*, Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri
- Pamudji, S. 1995. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Patilima, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Rasyid, Ryaas, 1998. *Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Yarif Watampone, Jakarta.
- Saefullah, A. Djaja, 1990, **Konsep Dan Metode Pelayanan Umum**. Mandiri, Bandung
- Sedarmayanti, Hj. 2004. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*. CV. Mandar Maju. Bandung.

Siagian, Sondang P. 2010. Teori dan Praktek Kepemimpinan. Jakarta: Rineka Cipta.

Sinambela, Poltak Lijan, dkk, 2006. *Reformasi Pelayana Publik*, Bumi Aksara : Jakarta.

Soekanto, Soejono, 1995. *Penilaian Organisasi Pelayanan Publik*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta.

Soetrisno, Lukman. 1995. Menuju Masyarakat Partisipatif. Yogyakarta: Kasinius.

SS, Khairuddin. 1992. Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta: Liberty.

Subana dan Sudrajat. 2005. Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah. Bandung: Pustaka Setia.

Sudarsono, 1998, **Manajemen Pelayanan Publik**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sukmaningsih, 1997, **Manajemen Pelayanan**, PT. Gramedia, Jakarta

Syafiie, Inu Kencana. 2006. Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama.

Tjokroamidjojo, Bintoro, 2001, **Reformasi Administrasi Publik**, MIA UNKRIS. Jakarta.

Winardi. 2000. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta : Rineka Cipta

Undang - Undang

UU No. 12 Tahun 2006, *Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*.

UU No 12 Tahun 2008, *Otonomi Daerah Perubahan Kedua UU No 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.

Peraturan Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat.

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 - 2034

Website

www.docstoc.com. Dokumen For Small Business & Professionals

<http://swamandiri.wordpress.com>

<http://m.batamtoday.com/berita104207-Kube-Nelayan-Mandiri-Jaya-Senggarang-Budidaya-Kuda-Laut.html>

http://mandirijaya148.blogspot.com/2017/03/kegiatan-sosial-organisasi-nelayan_8.html

Goleman, Daniel. 2003. *Kepemimpinan Yang Mendatangkan Hasil*. Yogyakarta : Amara Books. Online : <http://ummuathiyya.blogspot.com/2008/01/kepemimpinan-dalam-manajemen.html>. Diakses : 20 Februari 2009